



Evaluasi Program Kartu Puan Molek dalam Mengoptimalkan Distribusi LPG 3 Kilogram Bersubsidi di Kota Tanjungpinang

Yulian Jitmau^{1*}, Yudhanto Satyagraha Adiputra², Eki Darmawan³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: yulianjitmau3@gmail.com*

Abstrak. *The scarcity of subsidized 3-kilogram LPG in Tanjungpinang City has become a crucial public issue, primarily due to inaccurate distribution. The Puan Molek Card program was designed as an innovative solution to reorganize the LPG subsidy distribution mechanism to make it more manageable and in favor of poor households and eligible MSMEs. An evaluation based on William Dunn's six dimensions showed that in the initial phase, the program's effectiveness and efficiency were quite high, supported by collaborative data collection between local governments, neighborhood associations (RT/RW), and community social institutions. The card also provided convenient access and reduced the potential for hoarding by irresponsible individuals. However, over time, inconsistent card use and weak oversight caused the program's effectiveness to decline. Many residents returned to using ID cards (KTP) as a substitute, opening new opportunities for distribution irregularities. This indicates that the dimensions of accuracy and accountability have not been maintained sustainably. The study also noted that although LPG distribution was relatively smooth, there is a long-term potential for declining public trust if the government does not immediately implement improvements. Therefore, the main recommendations are strengthening the digital-based monitoring system to record LPG subsidy transactions in real time, as well as integrating the Puan Molek Card with population data to prevent misuse. Furthermore, local governments need to intensify public awareness campaigns on the importance of card use and conduct regular field monitoring. Cross-sector collaboration, including with Pertamina, distribution agents, and independent oversight bodies, is also needed to ensure the program returns to its primary objective: ensuring that the 3-kilogram LPG subsidy reaches those entitled to it.*

Keywords: 3 Kg LPG, Energy Subsidy, Program Evaluation, Puan Molek Card, Tanjungpinang City.

Abstrak. Kelangkaan LPG 3 kilogram bersubsidi di Kota Tanjungpinang telah menjadi persoalan publik yang cukup krusial, terutama karena distribusi yang tidak tepat sasaran. Program Kartu Puan Molek dirancang sebagai solusi inovatif untuk menata ulang mekanisme distribusi LPG subsidi agar lebih terkontrol dan berpihak pada rumah tangga miskin serta pelaku UMKM yang memang berhak menerima. Evaluasi berdasarkan enam dimensi menurut William Dunn memperlihatkan bahwa pada fase awal, efektivitas dan efisiensi program cukup tinggi, didukung oleh pendataan yang kolaboratif antara pemerintah daerah, RT/RW, dan lembaga sosial masyarakat. Kartu ini juga memberikan kesamaan akses dan mengurangi potensi penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakkonsistenan penggunaan kartu dan lemahnya pengawasan menyebabkan program mengalami penurunan efektivitas. Banyak warga kembali menggunakan KTP sebagai pengganti kartu, yang membuka celah baru bagi penyimpangan distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi ketepatan dan responsivitas belum dijaga secara berkelanjutan. Penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun distribusi LPG relatif lancar, ada potensi jangka panjang terhadap menurunnya kepercayaan publik jika pemerintah tidak segera melakukan perbaikan. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah penguatan sistem pengawasan berbasis digital untuk mencatat transaksi LPG subsidi secara real-time, serta pengintegrasian Kartu Puan Molek dengan data kependudukan agar tidak mudah disalahgunakan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengencangkan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan kartu dan melakukan monitoring lapangan secara berkala. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Pertamina, agen distribusi, dan lembaga pengawasan independen, juga diperlukan agar program ini kembali pada tujuan utamanya: memastikan subsidi LPG 3 kilogram benar-benar diterima oleh yang berhak.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Kartu Puan Molek, Kota Tanjung, LPG 3 Kilogram, Subsidi Energi.

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dimulai pada tahun 2007 sebagai respons atas tingginya subsidi minyak tanah yang membebani APBN dan menipisnya cadangan minyak. LPG dipilih karena lebih efisien, bersih, dan hemat subsidi dibanding minyak tanah. Program ini dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Tanjungpinang.

Dalam implementasinya, konsumsi minyak tanah rumah tangga terus menurun, sementara penggunaan LPG meningkat. Di Tanjungpinang, penurunan penggunaan minyak tanah terlihat jelas dari data BPS, dengan tren konsumsi yang menurun setiap tahun sejak 2017.

Namun, distribusi LPG 3 kg bersubsidi menghadapi tantangan serius, seperti tidak tepat sasaran dan adanya masyarakat mampu yang masih menggunakan subsidi. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang meluncurkan Program Kartu Puan Molek berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020. Kartu ini berfungsi sebagai identitas bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan UMKM penerima subsidi, dengan kuota yang telah ditetapkan (4 tabung/bulan untuk RTS dan 9 tabung/bulan untuk UMKM).

Program ini bertujuan menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, dan efisiensi subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran. Mekanisme pendataan dan verifikasi dilakukan secara berjenjang dari RT/RW hingga dinas terkait. Meski demikian, tantangan seperti penyalahgunaan subsidi, kurangnya pemahaman masyarakat, dan pengawasan distribusi masih harus diatasi agar program ini benar-benar efektif. Evaluasi program perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan efektivitas kebijakan ini bagi kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang di ambil sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah oleh penulis yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Elfrida Setia (2020) dengan judul “Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Tahun 2020 (Studi Desa Perak Kecamatan Cibai kabupaten manggarai) Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Perak telah memuaskan dari segi efektivitas. Program ini telah berjalan sesuai tujuan yang diharapkan, telah bermanfaat bagi penerimanya. Dampak positif yang bisa dilihat dari program KIP adalah orang tua yang semangat untuk mendorong anak-anaknya agar giat belajar lagi, serta meningkatnya keaktifan siswa-siswi penerima bantaun KIP di dalam kelas dan program KIP sudah tepat sasaran, Karena penerimanya KIP adalah anak-anak sekolah yang dari keluarga

kuarang mampu. Tapi masih berapa kendala di dalam pelaksanaannya, seperti pencairan dana yang tidak tepat waktu, masih ada siswa kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan KIP, dan bantuan KIP ini masih kurang dalam mencukupi kebutuhan siswa-siswi. Persamaan penelitin adalah mengevaluasi program atau kibijakan yang di buat oleh pemerintah. Mengevaluasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu bantuan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, yang menilai keberhasilan program berdasarkan enam variabel: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini berfokus pada dampak positif yang dari adanya program kartu KIP, yang meningkatkan motivasi belajar siswa dan siswi penerima KIP.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Febrianto, Dr. Arrazi Hasann & Merlyn Karuntu (2023) dengan judul “Analisis Penentuan Rute Distribusi Gas LPG 3 Kilogram Pada PT. Surya Mandiri Manado” Dari Analisis data menunjukkan bahwa PT. Surya Mandiri akan menghasilkan distribusi yang lebih baik dalam pedistribusian LPG 3 Kilogram jika mereka menggunakan rute distribusi awal dan menambah Armad kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode tindakan (*Action Research*). Data dipakai dalam analisi didapat melau observasi. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang jalurrute distribusi LPG 3 Kilogram oleh PT. Surya di Kota Manado.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Gusti Agung Baskoro (2019) Penelitian ini dengan judul “Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kilogram Yang Dilakuakn Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen (Studi di Pangkalan Misyra)” Dari hasil peneliti ini menunjukan harga enceran tertinggi LPG gas 3 kilogram adalah Rp.16.000 menurut aturan yang di tetapkan namum berdasarkan sumber data primer pangkalan menjualnya dengan harga Rp.18.000. Kenaikan harga ini bisa berakibat sanksi hukum untuk pangkalan yang nakal, sanksi administrasi, perdata dan pidana. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 konsumen bisa mentut pangkalan yang menaikkan harga. Penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang didapat dari data primer dan skunder lalu disimpulkan dalam kalimat-kalimat yang mudah di pahami pembaca. penelitia ini fokusnya pada masalah kenaikan harga LPG 3 Kilogram pada pangkalan yang tidak seusuai dengan harga enceran tertinggi yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Berikutnya jurnal yang ditulis oleh Nurdin, Arif Darmansyah & Fajriana dengan judul “Aplikasi Pemetaan Lokasi Distribusi Gas LPG 3 Kilogram MenggunakanAlgoritma Ant Colony Berbasis Android”. Hasil penelitian ini adalah Penelitian ini telah berhasil membuat aplikasi yang melacak lokasi distribusi LPG 3 Kilogram. Algoritma Ant Colony, yang berbasis

android, melakukan pencarian jalur tercepat. Uji coba menunjukkan bahwa aplikasi dapat menampilkan rute terpendek pada map dengan lebih cepat seiring dengan jumlah kota yang dimasukkan. Metode atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Algoritma Ant Colony, rute terpendek, memunculkan pemetaan lokasi distribusi. Algoritma Ant Colony adalah algoritma paling sering dipakai untuk pemetaan lokasi distribusi. Fokus penelitian ini memetakan distribusi LPG 3 kilogram dan jalur cepat dalam mendistribusi gas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh dan mendalam fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti tindakan, motivasi, persepsi, perilaku, dan sebagainya. Pendekatan deskriptif ini menggunakan bahasa dan kata-kata untuk menjelaskan pengalaman atau peristiwa tertentu. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan berbagai metode alamiah, yang memungkinkan peneliti mendapatkan data yang akurat dan mendalam dari subjek dengan mempertimbangkan elemen sosial, budaya, atau lingkungan yang mempengaruhi pemahaman subjek tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, data biasanya diperoleh melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen, yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti Moleong dalam (Nasution, 2023).

Menurut Setyosari dalam (Samsu, 2017). Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan situasi, objek, peristiwa, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan variabel tertentu, yang dapat dijelaskan menggunakan kata-kata maupun angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa yang diamati di lapangan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, proses pembangunan kedekatan harus dilakukan antara peneliti dan pihak terkait yang menjadi subjek penelitian. Metode mungkin termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kartu Puan Molek terbukti sangat efektif pada awal pelaksanaannya di tahun 2021. Program ini muncul sebagai respons atas krisis distribusi LPG 3 kilogram, di mana terjadi antrean panjang hingga menimbulkan korban jiwa. Dengan sistem berbasis kartu, distribusi LPG subsidi menjadi lebih tertib dan tepat sasaran. Masyarakat penerima manfaat merasa terbantu karena mendapatkan alokasi gas secara adil: 4 tabung per bulan untuk rumah

tangga sasaran (RTS) dan 9 tabung untuk pelaku UMKM. Namun, seiring berjalannya waktu, efektivitas program menurun. Banyak masyarakat tidak lagi menggunakan kartu tersebut dan beralih ke pembelian dengan menggunakan KTP. Penyebab utamanya adalah tidak adanya perbedaan harga maupun keunggulan pelayanan yang signifikan antara penggunaan kartu dan KTP. Akibatnya, fungsi kartu menjadi kurang relevan dan efektivitas program sebagai alat kontrol distribusi subsidi pun melemah.

Meskipun penggunaan kartu mulai ditinggalkan, dari sisi efisiensi, distribusi LPG 3 kg tetap berjalan lancar. Gas sampai ke pangkalan tepat waktu, tanpa hambatan berarti. Kebutuhan gas masyarakat terpenuhi secara merata. Bahkan tanpa penggunaan kartu, masyarakat tetap dapat membeli gas dengan mudah, menunjukkan bahwa sistem distribusi tetap efisien secara teknis. Hal ini juga didukung dengan adanya logbook dan pelaporan rutin yang membantu agen dan pangkalan dalam memantau pasokan serta permasalahan yang muncul.

Ketersediaan gas LPG 3 kg dinilai cukup oleh masyarakat dan pelaku pangkalan. Kuota gas yang diterima dinilai mencukupi kebutuhan bulanan baik untuk rumah tangga maupun UMKM. Masyarakat merasa kebutuhan gas harian tetap terpenuhi, baik menggunakan kartu maupun hanya dengan KTP. Sehingga dari segi kecukupan, program ini mampu memenuhi kebutuhan sasaran penerima. Temuan menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pelayanan. Semua masyarakat, baik pengguna kartu maupun yang hanya menggunakan KTP, dilayani secara setara. Saat program masih aktif, RTS dan UMKM menerima jatah gas secara merata sesuai ketentuan, tanpa adanya perbedaan perlakuan. Bahkan ketika penggunaan kartu mulai ditinggalkan, pelayanan tetap diberikan dengan prinsip kesetaraan.

Respons awal Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap krisis LPG melalui peluncuran Program Kartu Puan Molek menunjukkan responsivitas yang tinggi. Pemerintah melakukan verifikasi data secara ketat bersama RT/RW, Dinsos, dan Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Tindak lanjut terhadap distribusi dilakukan melalui pertemuan rutin bulanan antara Dinas Perdagangan, agen, dan Pertamina, serta pemantauan melalui grup komunikasi digital antar pangkalan. Namun, dalam perjalanannya, responsivitas pemerintah dinilai mulai melemah. Ketika penggunaan kartu mulai ditinggalkan, tidak ada penegasan atau evaluasi lanjutan yang efektif dari pemerintah untuk memastikan tujuan awal program tetap tercapai. Saat ini, pembelian gas kembali bebas menggunakan KTP, sehingga peluang penyelewengan subsidi kembali terbuka. Beberapa warga menyarankan perlunya langkah dari dinas untuk menghidupkan kembali fungsi kartu, misalnya dengan insentif atau kebijakan diferensiasi harga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program Kartu Puan Molek pada awalnya sangat efektif sebagai solusi krisis distribusi LPG subsidi, dengan mekanisme distribusi yang efisien dan merata. Namun, efektivitas jangka panjang program ini tidak berlanjut karena kurangnya penguatan regulasi dan insentif yang mendukung keberlanjutan penggunaan kartu. Program ini tetap berhasil dari segi efisiensi dan kecukupan, serta cukup responsif di awal pelaksanaan. Tetapi, untuk memastikan keberlanjutan dan ketepatan sasaran subsidi, perlu adanya evaluasi kebijakan serta pembenahan pada aspek implementasi teknis dan regulasi dari pemerintah daerah.

Saran

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu mendorong kembali penggunaan Kartu Puan Molek sebagai alat utama dalam pembelian LPG bersubsidi. Langkah ini penting agar sistem distribusi kembali berjalan sesuai tujuan awal—yakni menyalurkan subsidi secara tepat sasaran. Sosialisasi dan penegasan regulasi terkait penggunaan kartu perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada KTP.

Menjaga efektivitas program, pengawasan terhadap distribusi gas LPG 3 kilogram perlu dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh. Pemeriksaan rutin ke pangkalan serta audit penggunaan kartu harus diperkuat guna mencegah penyimpangan dan memastikan distribusi tetap sesuai sasaran. Pertemuan rutin antara Dinas, agen, dan Pertamina perlu dilakukan atau ditingkatkan, namun perlu diperluas cakupannya. Dinas dapat menyertakan laporan data penggunaan kartu di tiap pangkalan sebagai bahan evaluasi dalam setiap rapat, agar identifikasi kendala bisa lebih tepat dan responsif.

Diperlukan saluran pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat penerima manfaat untuk menyampaikan kendala atau penyimpangan di lapangan. Hal ini juga dapat memperkuat responsivitas dan mempercepat perbaikan program secara berkelanjutan. Apabila penggunaan kartu tidak lagi efektif di masyarakat, Dinas perlu mengevaluasi dan menyesuaikan bentuk intervensi, misalnya dengan digitalisasi sistem verifikasi pembelian LPG melalui aplikasi berbasis data terpadu agar tetap menjaga prinsip tepat sasaran namun lebih adaptif terhadap kebiasaan masyarakat saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Agnanditiya Carnarez, B. T. Y. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi profesional: Kepemimpinan, komunikasi efektif, kinerja, dan efektivitas organisasi (suatu kajian studi literatur review ilmu manajemen terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/592/360>.
<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>
- Alpad, A. (2022). Analisis peranan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (Studi kasus pada pemerintahan di Banda Aceh). *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 709-714. <https://doi.org/10.56832/edu.v2i3.232>
- Amelia, S. R. (2023). Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga LPG 3 kilogram di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.
- Arif, M. T. (2019). Penelitian evaluasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2. <https://www.ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/addabana/article/view/122/132>
- Gunawan, W. (2020). Pelaksanaan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 3.
- Handayani, P. (2022). Implementasi program Kartu Pelanggan LPG 3 kilogram oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (Skripsi). Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Harahap, A. U. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan elpiji 3 kilogram ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1, 2. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15055>
- Herdini, F., & Widiyarta, A. (2020). Responsivitas pelayanan publik dalam menangani keluhan pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nganjuk. *Public Administration Journal of Research*. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i1.38>
- Humairah, U. L., Kusumastuti, E. D., & Supriatna, I. (2021). Analisis pengelolaan retribusi parkir sebagai strategi peningkatan pendapatan asli daerah (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 466-479. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Ikkal, M., Yaqin, M. I., Mallibureng, E., & ... (2023). Optimasi pendapatan daerah melalui strategi cerdas: Maksimalkan potensi retribusi parkir bersama Dinas Perhubungan Kota Parepare. *Jurnal Ilmiah ...*, 9(3), 234-240.
- Lagantondo, H. A. K. H. R. T. (2023). Analisis pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Tiwa'a (Studi kasus di Desa Tiwa'a, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara). *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 25. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.507>
- Nasya Imroatu Sidqa. (2021). Analisis yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyaluran elpiji 3 kilogram bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dengan pangkalan Ratih Prasetya Dewi beserta akibat hukumnya (Tugas Akhir). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurdin, A. D., & F. (2020). Aplikasi pemetaan lokasi distribusi elpiji 3 kilogram menggunakan algoritma ant colony berbasis Android. *Jurnal CoreIT*, 6. <https://doi.org/10.24014/coreit.v6i1.9439>

- P., P., & Prameswari, U. (2022). Efisiensi program konversi minyak tanah ke LPG pada masyarakat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. In Proceedings IPDN.
- Purnomo, A. H. D. R. N. R. M. A. M. S. D. M. Sari. (2022). Evaluasi program pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/5056/3493>
- Rahayu, K. D., Sukma, E., Fikriyatunnisa, & Syahputra, D. (2023). Penyebab kelangkaan elpiji 3 kilogram di kalangan masyarakat Kabupaten Bengkalis. *Journal of History and Social Sciences*, 2.
- Ramadhan, T., Liesmana, R., & Putera, R. E. (2019). Pengawasan pendistribusian LPG 3 kilogram bersubsidi di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1. <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2482>
- Rauzalia. (2023). Evaluasi program beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh [Tugas Akhir, UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36299/1/Rauzalia,190802088,FISIP,IAN.pdf>
- Sayyida, R., & Akhmaddhian, S. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplos tabung LPG bersubsidi. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13, 2. <https://doi.org/10.25134/logika.v13i01.2558>
- Setia, E. (2020). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Tahun 2020 (Studi Desa Perak, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai). Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Yanti, N. N. K. (2022). Evaluasi kebijakan WFH terhadap pelayanan publik di Indonesia. *Widyanata*, 19. <https://doi.org/10.54836/widyanata.v19i2.999>